

PERAN PEMERINTAH KOTA DALAM PEMBANGUNAN FISIK DI WILAYAH BATU CERMIN KELURAHAN SEMPAJA UTARA KECAMATAN SAMARINDA UTARA

Array Prayoga¹

Abstrak

Array Prayoga, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan. Peran Pemerintah Kota dalam Pembangunan Fisik di Wilayah Batu Cermin Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara, di bawah bimbingan Prof.Dr.Drs.H Masjaya, M.Si selaku dosen pembimbing 1 dan Dr.Rita Kala Linggi, M.Si selaku dosen pembimbing 2.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui peran pemerintah kota dalam pembangunan fisik di wilayah Batu Cermin Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Deskriptif Kualitatif dengan sumber data dari Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Samarinda, Kepala Kelurahan Sempaja Utara, RT dan Masyarakat Batu Cermin. Dengan menggunakan Teknik Purposive Sampling.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah Observasi (pengamatan), Wawancara, dan Penggunaan dokumen. Untuk analisis data menggunakan metode kualitatif model interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, Data Reduksi atau Penyederhanaan Data, Penyajian Data, dan Penarikan kesimpulan/verifikasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan, disimpulkan bahwa Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Fisik di Wilayah Batu Cermin Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara dalam pembangunan fisik belum dilakukan sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat menuntut kepada pemerintah dalam hal pembangunan fisik di wilayah tersebut. Dari hasil penelitian ternyata pemerintah merespon cepat dengan membangun prasarana fisik di wilayah tersebut. Hal ini terbukti dari hasil penelitian bahwa dalam perannya Pemerintah Kota telah melaksanakan beberapa pembangunan fisik seperti akses jalan, sarana kesehatan dan sarana pendidikan

Kata kunci: : Peran, Pemerintah Kota, Pembangunan Fisik, Batu Cermin .

Pendahuluan

Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah yang di atur dalam Undang – undang nomor 32 tahun 2004 sebagai salah satu bentuk desentralisasi oleh pemerintah yang pada hakikatnya di tujuan untuk memenuhi kepentingan negara secara menyeluruh. Hal ini sebagai upaya untuk mendekatkan pada tujuan dari penyelenggaraan

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: array.prayoga.ap@gmail.com

pemerintahan serta mewujudkan cita-cita masyarakat menjadi lebih baik, berkeadilan, makmur dan sejahtera. Otonomi daerah memiliki arti bahwa pemerintah daerah mampu berinisiatif dan berkreaitivitas untuk menjalankan pemerintahannya sendiri serta menumbuhkan demokratisasi masyarakat dalam pembangunan, sehingga daerah seperti kabupaten/kota memiliki ruang gerak yang luas dalam melaksanakan pembangunan, karena tidak terbebani lagi dengan program-program pembangunan dari pemerintah pusat.

Selanjutnya dalam UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, bahwa prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang – undang . Daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat termasuk perencanaan pembangunan di daerah. Daerah didalam era otonomi diharapkan menjadi wadah yang tepat bagi pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di berbagai sektor. Hal ini bertujuan agar daerah bersangkutan dapat memaksimalkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam di daerahnya. Beberapa daerah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Samarinda yang berada di pinggiran dan jauh dari pusat kota, ada yang berbatasan langsung dengan daerah lain yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara dan menjadi jalur keluar masuk kota menuju daerah lain yang sebenarnya bisa menjadi daerah yang cukup strategis. Namun letak daerah yang berada jauh dari pusat kota dan pusat konsentrasi kegiatan masyarakat, membuat daerah – daerah pinggiran menjadi lebih tertinggal, terutama dalam hal infrastruktur dibanding dengan pusat kota. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kota Samarinda lebih memfokuskan pembangunan pada pusat kota, sementara daerah pinggiran jauh dari pembangunan yang merata. Padahal, dilihat dari letak geografisnya yang berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara, wilayah ini dapat menjadi daerah yang strategis sebagai pintu gerbang menuju Kota Samarinda, dimana hal tersebut dapat memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat, mempermudah alur distribusi barang dan jasa serta meningkatkan aksesibilitas Kota Samarinda. Kondisi terparah dan menjadi perbincangan hangat diberbagai media lokal, terjadi di wilayah RT. 07, awalnya daerah ini memiliki 100 kepala keluarga, namun sejak tahun 2011 puluhan kepala keluarga mulai meninggalkan wilayah ini dan hingga kini hanya tersisa 28 kepala keluarga saja yang masih bertahan. Adapun yang menjadi permasalahan utama warga meninggalkan daerah tersebut ialah, *Pertama* : minimnya fasilitas publik seperti jalan utama dan jembatan yang terbuat dari bahan kayu ulin dalam kondisi rusak parah dan belum pernah diperhatikan oleh pemerintah sama sekali, kondisi diperparah dengan banyaknya kendaraan besar pengangkut material dari aktifitas tambang golongan C dan pembukaan lahan, ketika hujan turun jalanan pun menjadi becek dan penuh lumpur, drainase yang baik juga tidak dimiliki daerah ini, *Kedua* : Tidak pernah adanya aliran air bersih dan listrik yang memadai kepada warga di daerah

tersebut sejak awal kampung berdiri hingga saat ini, *Ketiga* : Fasilitas publik yang ada seperti sekolah, puskesmas, masjid menjadi terbengkalai akibat sulitnya akses jalan untuk menjangkau sarana umum tersebut, *Keempat* : sekolah dasar negeri, SD 029 yang dibangun tahun 1983 silam dan menjadi satu – satunya sarana pendidikan di wilayah tersebut kondisinya sangat memprihatinkan, bahkan kini hanya memiliki 23 orang siswa siswi untuk 6 kelas. Para siswa memilih pindah sekolah dikarenakan jarak sepanjang 3 kilometer dengan medan berat yang harus di tempuh untuk bersekolah. Fakta dilapangan yang saya temui, dari jalan masuk Batu Cermin di pertigaan jalan KH. Wahid Hasyim dan jalan Batu Besaung, hanya kurang lebih 1 kilometer hingga Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) negeri 6 saja yang ber aspal, sisanya sepanjang kurang lebih 6 kilometer hingga RT.07 rusak parah, berdebu, berbatu dan berlumpur ketika hujan turun. Fasilitas umum seperti puskesmas pun hampir tidak terlihat akibat tertutup oleh ilalang dan rumput tinggi yang merambat di dinding bangunan yang terbuat dari kayu tersebut.

Berdasarkan semua prihal di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap peran pemerintah kota dalam pembangunan fisik di wilayah Batu Cermin kelurahan Sempaja Utara kecamatan Samarinda Utara dengan judul penelitian : ***Peran Pemerintah Kota Dalam Pembangunan Fisik di Wilayah Batu Cermin Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara.***

Kerangka Dasar Teori

Pengertian Peran

Peran berarti laku atau posisi atau pelaku yang di ambil bertindak. Didalam kamus besar bahasa Indonesia peran ialah perangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat (2005 : 854). Istilah peran sering digunakan untuk menunjukkan gabungan yang terjadi antar pola-pola kebudayaan yang berkaitan dengan posisi status tertentu. Peran meliputi sikap, nilai-nilai perilaku yang ditentukan oleh masyarakat kepada setiap dan semua orang yang menduduki jabatan tertentu. Peran juga dapat dikatakan sebagai perwujudan dari setiap pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang. Seseorang dapat dikatakan telah berperan atau mengambil peran jika telah melaksanakan hak dan kewajibannya didalam kehidupan bermasyarakat maupun berorganisasi.

Pemerintah

Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih (2008:112) mengatakan, Pemerintah adalah alat bagi negara dalam menyelenggarakan segala kepentingan rakyatnya dan merupakan alat dalam mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan.

Sementara itu Faried Ali (2012:2) mengatakan pengertian sempit dari pemerintah ialah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dan dalam arti luas adalah seluruh lembaga dan kegiatannya dalam suatu negara, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan legislatif dan yudikatif.

Pendapat ahli lainnya, Strong (dalam Suradinata 2002;130), mengatakan bahwa pemerintah dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara baik kedalam maupun keluar, yang pertama haruslah mempunyai kekuatan tentara atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, kedua harus mempunyai kekuatan legislatif dalam arti membuat undang-undang, dan ketiga harus mempunyai kekuatan finansial. Selanjutnya ia mengatakan bahwa pemerintah adalah organisasi yang mempunyai kekuatan besar dalam suatu negara, mencakup urusan rakyat, teritorial dan urusan kekuasaan dalam rangka pencapaian tujuan negara.

Pemerintah Daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa : “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-undang.” Pemerintah Daerah merupakan konsekuensi logis adanya perbedaan etnis, linguistik, agama, dan institusional sosial berbagai kelompok masyarakat lokal suatu negara.

Pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Pasal 1 butir 1 disebutkan bahwa, Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintah daerah menurut Pasal tersebut adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dan yang dimaksud dengan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pemerintah Kota

Pemerintah Kota atau yang disebut daerah tingkat II, adalah pelaksana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dibawah pemerintah tingkat I atau Provinsi dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara Republik Indonesia dan Undang-undang dasar 1945. Susunan organisasi Pemerintah Kota terdiri dari seorang Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Camat dan Lurah.

Fungsi dan Wewenang Pemerintah Kota

Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan. Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa urusan wajib yang

menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota. Urusan pemerintahan Kabupaten/Kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Dalam hal pelaksanaan fungsi dan wewenang pemerintah daerah, hal tersebut juga di atur dalam peraturan daerah, dimana pemerintah daerah menentukan tugas pokok dan fungsi serta wewenang sesuai dengan bidang nya masing – masing.

Kota

Kota seringkali di anggap sebagai pusat bagi segala aktifitas kegiatan masyarakat, penuh moderenisasi serta kemajuan suatu daerah. Sementara itu Raldi Hendro Koestoer (2001:9) berpendapat bahwa kota adalah suatu permukiman yang bangunan rumahnya rapat dan penduduknya bernafkah bukan pertanian. Pengertian lain, kota dicirikan oleh adanya sarana prasarana perkotaan seperti bangunan besar bagi pemerintahan, rumah sakit, sekolah, pasar, alun-alun dan taman yang luas serta jalan aspal yang lebar. Pemahaman masyarakat terhadap perspektif bentuk bangunan kota.

Pembangunan

Bachtiar Efendi (2002:9) mengatakan pembangunan sesuai dengan hakekat pembangunan nasional, ialah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Sementara pembangunan menurut Iwan Nugroho (2004:9) dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi.

Pembangunan Fisik dan Non Fisik

Pembangunan sendiri dapat diklasifikasi kan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu pembangunan fisik dan pembangunan non fisik, menurut Michael P Todaro (2000:20). Pembangunan fisik adalah pembangunan yang nampak secara nyata, berwujud, serta dapat dilihat dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat setempat. Sementara itu pembangunan non fisik adalah pembangunan yang tidak terwujud secara fisik dan pada dasarnya objeknya ialah manusia. Pembangunan non fisik meliputi :

1. Pembinaan bidang keagamaan
2. Pembinaan bidang kesehatan dan keluarga berencana
3. Pembinaan bidang ketertiban dan keamanan

Definisi Konsepsional

Berdasarkan teori dan konsep pendukung yang ada, maka penulis merumuskan definisi konsepsional sesuai dengan judul penelitian ini yaitu Peran pemerintah kota Samarinda dalam pembangunan fisik yang merupakan suatu

tindakan, tingkah laku atau pun fungsi yang diharapkan pada pemerintah kota Samarinda dalam pembangunan, pengadaan, penyediaan dan perawatan sarana prasarana infrastruktur fisik untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh masyarakat di wilayah Batu Cermin kelurahan Sempaja Utara kecamatan Samarinda Utara.

Fokus Penelitian

Sesuai dengan pendapat yang telah dikemukakan diatas tadi, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Peran pemerintah kota Samarinda dalam pembangunan fisik di wilayah Batu Cermin.
 - 1.1 Pelaksanaan pembangunan sarana prasarana fisik jalan.
 - 1.2 Pelaksanaan pembangunan sarana prasarana fisik pendidikan.
 - 1.3 Pelaksanaan pembangunan sarana prasarana fisik kesehatan.
2. Faktor pendorong dan penghambat peran pemerintah kota dalam pembangunan fisik di wilayah Batu Cermin kelurahan Sempaja Utara kecamatan Samarinda Utara.

Jenis dan Sumber Data

- a. Sesuai dengan judul dari penelitian ini maka jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang memaparkan dan bertujuan untuk memberikan gambaran serta penjelasan dari variable yang di teliti. Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Dalam hal ini adalah memberikan gambaran tentang peran pemerintah kota Samarinda dalam pembangunan fisik di wilayah Batu Cermin kelurahan Sempaja Utara kecamatan Samarinda Utara.
- b. Menurut J. Moleong (2002 : 2) informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Adapun dalam penentuan informan dilakukan secara *purposive sampling*, sebagaimana dinyatakan Sugiyono (2010 : 68), bahwa *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yaitu orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin yang bersangkutan sebagai orang yang memiliki kuasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti. Oleh karena itu, yang dijadikan *key informan* adalah Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Pemerintah Kota Samarinda. Kemudian peneliti juga menggunakan Lurah kelurahan Sempaja Utara, Ketua RT 07 Batu Cermin dan warga masyarakat sebagai *informan* guna melengkapi kebutuhan data dari penelitian ini.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian diperoleh dari lapangan melalui observasi dan wawancara dengan informan yang memberikan informasi serta pengumpulan dokumen yaitu dengan mempelajari laporan dan arsip yang berhubungan dengan penelitian yaitu masalah peran pemerintah kota dalam pembangunan fisik di wilayah Batu Cermin kelurahan Sempaja Utara kecamatan Samarinda Utara.

Dalam analisis data dan pembahasan ini, akan diuraikan bagaimana peran pemerintah kota dalam pembangunan fisik di wilayah Batu Cermin kelurahan Sempaja Utara kecamatan Samarinda Utara.

Peran Pemerintah Kota dalam pembangunan fisik

Pemerintahan daerah Provinsi dan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan. Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah dijelaskan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota. Pasal 14 UU Nomor 32 ayat 1 poin a, dikatakan bahwa urusan wajib Pemerintah Daerah adalah perencanaan dan pengendalian pembangunan, poin d penyediaan sarana dan prasarana umum. Dalam poin tersebut terlihat bahwa pemerintah daerah memiliki tugas besar dalam pembangunan fisik di daerahnya guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pemerintah Kota Samarinda dalam menjalankan perannya di bidang pembangunan, di bantu oleh bidang-bidang teknis di dalam strukturalnya. Pemerintah Kota memiliki bidang pembangunan yang bertugas mengkoordinasikan program pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Samarinda yang kemudian nantinya akan di limpahkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) untuk direncanakan pembangunannya dalam skala prioritas Pemerintah Daerah, baik tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan produk hukum rencana pembangunan daerah lainnya. Pembangunan yang merupakan prioritas dan telah siap untuk di eksekusi di lapangan, akan di ambil oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Pemerintah Samarinda yang berperan melakukan pembangunan fisik seperti sekolah, fasilitas umum, rumah sakit dan bangunan pemerintah lainnya. Untuk urusan jalan raya, drainase dan jembatan di kerjakan secara fisik oleh Instansi struktural Pemerintah Kota Samarinda, Dinas Bina Marga dan Pengairan.

Pembangunan Prasarana Jalan.

Pembangunan jalan merupakan salah satu faktor pendukung maju dan berkembangnya daerah, dikarenakan dengan adanya pembangunan jalan maka akan dengan segera membuka akses yang menghubungkan antar suatu daerah dengan daerah lainnya begitupun dengan di daerah pinggiran kota. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang penulis lakukan. Dari beberapa informan di dapat informasi bahwa saat ini pembangunan bidang sarana prasarana jalan

sudah terlaksana dengan cukup baik dan mulai menunjukkan adanya perkembangan dan perhatian dari pemerintah hal ini juga di dukung dengan inisiatif masyarakat untuk mengadukan keadaan mereka langsung kepada Pemerintah Daerah.

Akan tetapi penulis juga melihat adanya kelalaian dari Pemerintah Kota Samarinda dikarenakan setelah bertahun – tahun wilayah Batu Cermin dalam kondisi prasarana jalan nya yang buruk. Pemerintah Kota terlihat memberikan perhatiannya setelah adanya inisiatif dari warga masyarakat yang mengadukan kondisi yang mereka alami selama ini. Pemerintah Kota Samarinda memang memiliki perhatian khusus dalam pembangunan dan penyediaan sarana prasarana jalan, hal ini dapat kita lihat dari beberapa pembangunan peningkatan kualitas jalan, baik pengecoran, pengaspalan maupun pelebaran jalan di dalam kota maupun di dalam wilayah permukiman warga seperti gang atau jalan kecil.

Pembangunan Prasarana Pendidikan

Sarana dan prasarana pendidikan adalah salah satu faktor pendukung dan penunjang dalam proses peningkatan kualitas hidup dan sumber daya manusia (SDM) terutama dalam menghadapi arus globalisasi dan persaingan antar manusia yang semakin meningkat, sehingga saat ini pendidikan menjadi prioritas utama masyarakat hingga menjadi program utama dalam rencana kerja pemerintahan. Saat ini pemerintah pusat hingga daerah juga menggalakkan program 12 tahun wajib belajar, bahkan pendidikan anak sejak usia dini telah mulai di giatkan, terbukti dengan adanya PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) yang telah juga di kembangkan oleh Pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara, penulis menyimpulkan bahwa sarana prasarana pendidikan di wilayah Batu Cermin Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara, dari kondisi bangunan fisik nya, sebenarnya dalam kondisi yang kurang layak dikarenakan sejak awal dibangun hingga sekarang, belum ada renovasi dalam bangunan fisik sekolahnya. Sekolah unggulan maupun sekolah biasa, juga harus mendapatkan perhatian dan perlakuan yang sama dari pemerintah, baik dari segi bangunan fisiknya, kelengkapan prasarana belajar mengajar, hingga fasilitas penunjang sehingga pendidikan yang di amanatkan oleh Undang – Undang Dasar 1945 dapat bermanfaat dan dirasakan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi warga Kota Samarinda.

Pembangunan Prasarana Kesehatan

Sarana kesehatan merupakan salah satu penunjang kebutuhan masyarakat. Fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan medik kepada pasien dengan mutu sebaik baiknya. Menggunakan tata cara dan teknik berdasarkan ilmu kedokteran dan etik yang berlaku sehingga dapat di pertanggung jawabkan kepada pasien. Rumah Sakit, Puskesmas hingga Posyandu merupakan bagian dari sarana kesehatan yang di siapkan oleh pemerintah untuk menunjang pembangunan non fisik bagi masyarakat sekitar. Sarana kesehatan merupakan kebutuhan mendasar yang sangat diperlukan dan mendesak harus segera tersedia guna melayani

kebutuhan manusia. Untuk itu, Pemerintah berkewajiban menyediakan sarana prasarana kesehatan yang sangat layak dan memadai untuk dapat dinikmati masyarakat.

Di wilayah pinggiran Kota Samarinda, seperti wilayah Batu Cermin Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara terdapat salah satu prasarana fisik kesehatan yang pernah dibangun oleh Pemerintah Kota Samarinda dimasa lalu, yaitu Puskesmas Pembantu Gunung Cermin. Puskesmas Pembantu ini awalnya di harapkan mampu menjadi sarana penunjang bagi permasalahan kesehatan masyarakat di pelosok kampung Batu Cermin. Namun kurangnya perhatian dari Pemerintah Daerah terhadap daerah di pinggiran kota, menyebabkan tidak berfungsi secara maksimal nya sarana prasarana kesehatan di wilayah ini. Namun berkat usaha warga sekitar untuk menyampaikan masalah ini kepada pemerintah daerah, kini perlahan permasalahan tersebut dapat teratasi. Pemerintah daerah terlihat dapat mengakomodir keluhan masyarakat Batu Cermin dengan segera merespon cepat atas aspirasi dan kebutuhan masyarakat tersebut. sehingga kebutuhan masyarakat akan fasilitas kesehatan akan segera terpenuhi.

Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan adalah salah satu unsur utama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Karena dengan terwujudnya kesehatan bagi masyarakat, maka secara otomatis masyarakat dapat meningkatkan kemampuannya untuk dapat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Pemerintah Kota Dalam Pembangunan Fisik di Wilayah Batu Cermin Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara.

Dalam hasil penelitian di lapangan dan wawancara yang penulis lakukan terkait pemerintah kota Samarinda dalam menjalankan perannya di bidang pembangunan fisik di wilayah Batu Cermin telah didapati bahwa adanya faktor - faktor yang terjadi dalam mendukung dan menghambat jalannya Peran Pemerintah Kota dalam Pembangunan Fisik di wilayah Batu Cermin Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara. Untuk itu penulis akan menjabarkan faktor – faktor tersebut yang di temui dalam penelitian yang telah di lakukan di lapangan. Adapun yang menjadi faaktor pendukung nya antara lain:

- a. Adanya kepedulian dari warga di wilayah Batu Cermin Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara untuk menyampaikan keluhan yang telah mereka alami sejak lama yang terjadi di daerahnya.
- b. Adanya respon dan dukungan serta tanggapan yang positif dari Pemerintah Kota Samarinda, hal ini cukup mengobati kekecewaan masyarakat akibat tidak adanya perhatian dari Pemerintah Kota Samarinda pada waktu sebelumnya.
- c. Adanya Kerja sama yang baik antar Pemerintah Kota Samarinda dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serta semua pihak dalam hal sharing pendanaan dan pembangunan fisik, sehingga permasalahan yang terjadi di wilayah Batu Cermin dapat segera terselesaikan.

Sementara itu mengenai hambatan-hambatan yang di hadapi dalam kegiatan dan pelaksanaan peran pemerintah kota dalam pembangunan fisik di wilayah Batu Cermin selama ini didapati faktor – faktornya sebagai berikut, antara lain :

- a. Masih kurangnya peran pemerintah kota Samarinda dalam melakukan kontrol ke wilayah daerah pinggiran, terbukti dengan lama nya kondisi di Batu Cermin yang terabaikan.
- b. Kurangnya komunikasi antara pemerintah kota dengan satuan kerja dibawahnya, seperti perangkat dinas terkait, kecamatan hingga kelurahan serta tidak maskimalnya pelaksanaan Musrenbang sehingga tidak maksimalnya proses penyerapan aspirasi di masyarakat.
- c. Anggaran pemerintah kota yang terbatas, sehingga pembangunan fisik belum menyentuh seluruh wilayah secara merata .

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan berkenaan dengan peran pemerintah kota Samarinda dalam pembangunan fisik di wilayah Batu cermin kelurahan Sempaja Utara kecamatan Samarinda Utara adalah sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah Kota Samarinda dalam pembangunan sarana prasarana jalan belum terlaksana, karena perbaikan fisik jalan baru di lakukan setelah adanya permohonan yang diajukan oleh masyarakat yang telah bertahun-tahun hidup dalam kondisi jalan yang rusak parah sepanjang 12 km, dari depan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Batu Cermin sampai dengan ujung jalan cabang yang tembus ke daerah L2 di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan jalan Batu Besaung di wilayah Kota Samarinda. Pemerintah Kota Samarinda masih belum memperhatikan dan peka terhadap kondisi daerah yang berada di pinggiran kota, walaupun setelah adanya ajuan dari masyarakat barulah pemerintah Kota Samarinda merespon cepat dan segera melakukan pembangunan dan pelebaran jalan sepanjang 12 Km di wilayah tersebut.
2. Peran Pemerintah Kota Samarinda dalam pembangunan prasarana pendidikan di wilayah Batu Cermin yaitu Sekolah Dasar Negeri 029, belum dapat dikatakan baik. Selama ini kondisi sekolah dasar 029 di wilayah tersebut dalam kondisi sangat memprihatinkan seperti banyaknya atap sekolah yang mulai berlubang dan bocor sehingga ketika turun hujan, air akan merembes ke dalam ruang kelas yang berakibat dalam terganggunya proses belajar dan mengajar, kemudian kursi dan meja belajar dalam kondisi banyak yang telah rusak serta lingkungan di sekolah yang mulai tidak terawat dan belum pernah sama sekali tersentuh perbaikan serta direnovasi sejak awal pembangunannya. Hal inilah yang berakibat pada semakin menurunnya minat orang tua menyekolahkan anaknya disekolah tersebut, terlihat dari semakin berkurangnya jumlah siswa yang bersekolah di SDN 029 dan belum ada

perhatian pemerintah kota Samarinda atas permasalahan tersebut, padahal sekolah dasar 029 tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar Batu Cermin untuk memberikan pendidikan kepada anak – anaknya dikarenakan sekolah lain jaraknya cukup jauh dari wilayah tinggal mereka.

3. Peran Pemerintah Kota Samarinda dalam pembangunan sarana prasarana kesehatan di wilayah ini yaitu terhadap keberadaan Puskesmas Pembantu Gunung Cermin juga masih dinilai kurang. Berdasarkan realita di lapangan fasilitas yang tersedia masih sangat minim seperti alat – alat penunjang kesehatan dan perlengkapan kesehatan lainnya, pasien juga mendapatkan layanan kesehatan dengan fasilitas utama yang memprihatinkan, hal ini terlihat dari kondisi fisik bangunan yang nampak mulai kusam, rusak serta luas bangunan tidak sebanding dengan kebutuhan, padahal persoalan kesehatan merupakan hal mendesak dan yang utama untuk segera dipenuhi oleh Pemerintah, terutama bagi warga daerah pinggiran yang memiliki akses yang cukup jauh bila harus menggunakan fasilitas kesehatan yang berada di tengah kota. Namun walau sarana prasarana masih minim, akan tetapi masyarakat masih tetap terlayani. Walaupun setelah adanya laporan masyarakat, pemerintah segera merespon cepat dengan menyediakan alternatif puskesmas dengan bangunan sementara untuk bisa segera digunakan masyarakat dan akan segera mendirikan bangunan puskesmas baru yang lebih baik dan layak.

Saran

Berdasarkan beberapa hasil kesimpulan diatas penulis akan mencoba untuk memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota dalam pelaksanaan pembangunan fisik, agar tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat, harus cepat tanggap dan responsif. Pemerintah Kota harus lebih memaksimalkan fungsi pengawasan dengan struktural instansi dibawahnya hingga kelurahan serta menjalankan fungsi kontrol dengan baik agar aspirasi masyarakat dapat benar benar terserap. Jalan merupakan urat nadi utama penggerak perokonomian. Pemerintah harus menyegerakan pembangunan akses jalan di Batu Cermin serta menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lain agar saling terkoneksi dan tidak terisolasi.
2. Pemerintah Kota Samarinda wajib memberi perhatian peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan prasarana pendidikan yang memadai. Pemerintah harus merespon cepat dengan perbaikan sekolah dasar 029 di Batu Cermin, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat maksimal kembali.
3. Pemerintah Kota Samarinda agar cepat dalam permasalahan kesehatan. Kesehatan harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat, baik di kota maupun di pedalaman. Penyediaan fasilitas kesehatan yaitu Puskesmas Pembantu Gunung Cermin yang layak, serta alat – alat kelengkapan kesehatan harus menjadi perhatian utama.

Daftar Pustaka

- Anonim, 2005 . *Kamus Besar Bahasa Indonesia ; Cetakan ke – 10*. Jakarta; Balai Pustaka.
- Nugroho, Iwan. 2004. *Pembangunan Wilayah : Perspektif Ekonomi, Sosial dan lingkungan*, Jakarta; Pustaka LP3ES Indonesia.
- Koestoer, R. Hendro. 2001 *Dalam Dimensi Keruangan Kota ; Teori dan Kasus*, Jakarta; Penerbit Universitas Indonesia.
- Kusnardi, Moh. & Saragih, R. Bintan. 2008. *Ilmu Negara*. Jakarta; Gaya Media Pratama.
- Jimung, Martin. 2005. *Politik lokal dan Pemerintah Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Yogyakarta; Yayasan Pustaka Nusantara.
- Soerjono, Soekanto. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta; CV. Rajawali
- Suhendra. 2006. *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung; Alfabeta.
- Ali, Farid. 2012. *Hukum Tata pemerintahan; Heteronom dan Otonom*. Bandung; Refika Aditama.
- Syafei. 2002. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta; PT. Rineka Cipta
- Suradinata, Ermaya. 2002. *Pemimpin dan Kepemimpinan Pemerintah Suatu Pendekatan Budaya*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kencana, Inu. 2011. *Ekologi Pemerintahan*. Bandung; Penerbit Pustaka Reka Cipta.
- Khairuddin. 2002. *Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta; Penerbit Liberty.
- Sarundajang. 2002 *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*. Jakarta; Sinar Harapan.
- Todaro, P. Michael. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta; Ghalia Indonesia.
- Suryono, Agus. 2001. *Teori dan Isu Pembangunan*. Jakarta; UN Press
- Riyadi & Deddy Supriyadi Bratakusumah. 2004. *Peran Pemerintah Daerah*. Jakarta; Gramedia Pustaka Utama.
- Ishaq, Isjoni. 2006. *Membangun Visi Bersama*. Jakarta; Yayasan Obor Indonesia

Reverensi Lainnya :

- Buku Monografi Kelurahan Sempaja Utara tahun 2014.
- Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintah Daerah*.
- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 tahun 2011 Tentang Perubahan atas peraturan daerah nomor 09 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat Daerah kota samarinda